

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BANYU URIP KABUPATEN BOJONEGORO

(Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)

Abdul Rochman Zaki¹, Abdul Hakim¹, Farida Nurani¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: kokok_ayam@rocketmail.com

Abstrak: Social Economic Impact of Oil and Banyu Urip Gas Mining in Bojonegoro Regency. This study is based on the phenomenon in some areas, people are found living around the mining areas less prosperous life. The hope with the establishment of a business will create new jobs. But by reason of education and inadequate skills, people can not work in it. Bojonegoro has 40 wells are estimated to contain 600 million barrels of oil and 1.7 million trillion - 2 trillion cubic feet (TCF), the well will be managed Exxon-mobile. The most famous location exploits is banyuurip. It has oil and gas reserves as well as the greatest near residential areas. Focus of this study is show the socio-economic impacts include livelihoods, changes in social values and the role of pemerintah Bojonegoro with a mining project in Banyu Urip. The results showed, the transition livelihoods Gayam the previously dominant agricultural sector to switch to the mining sector. Rising income level and lead to a more prosperous, multiplier effect of mining sector wage increases have affected the non-mining sectors. Role of Government Bojonegoro successful in providing the mining sector policies that support the community. Seen from the socio-economic situation Gayam.

Keywords: Social Impact, Oil Mining

Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini didasarkan pada fenomena di beberapa daerah bahwa banyak ditemukan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan hidup kurang sejahtera. Harapannya dengan berdirinya suatu usaha akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi dengan alasan pendidikan dan keahlian yang tidak memadai, masyarakat tidak bisa bekerja di dalamnya. Bojonegoro mempunyai 40 sumur yang diperkirakan mengandung 600 juta barel minyak dan 1,7 juta triliun - 2 triliun kaki kubik (TCF), sumur tersebut akan dikelola Exxon-mobile. Lokasi eksploitasi yang terkenal adalah banyu urip. Lokasi tersebut memiliki cadangan minyak dan gas paling besar serta dekat pemukiman warga. Fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak sosial ekonomi yang meliputi mata pencaharian, perubahan nilai sosial masyarakat serta peran dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan adanya proyek pertambangan di Banyu Urip. Hasil penelitian menunjukkan, adanya peralihan mata pencaharian masyarakat Gayam yang sebelumnya dominan di sektor pertanian beralih ke sektor pertambangan. Tingkat pendapatan meningkat dan mengarah lebih sejahtera. *Multiple effect* sektor pertambangan telah mempengaruhi kenaikan upah sektor non-pertambangan. Peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sukses dalam memberikan kebijakan sektor pertambangan yang mendukung masyarakat. Terlihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Gayam. Adanya perda konten lokal dan keterlibatan masyarakat, dapat meredam konflik sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan banyu urip.

Kata Kunci : Dampak sosial, Pertambangan Minyak

Pendahuluan

Sektor Migas telah menjadi elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 1980-an Indonesia merupakan Negara

pengekspor minyak di dunia. Indonesia telah menempatkan paradigma pendirian perusahaan tambang sebagai agen

pembangunan, agen modernitas yang akan membawa perubahan untuk pembangunan sosial ekonomi. Beberapa tahun terakhir kotapertambangan berdiri, selain itu Indonesia juga telah memiliki kota pertambangan warisan dari jaman belanda. Tetapi yang menjadi persoalan sejauh mana Negara berhasil menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sekitar tambang.

Menurut ANDAL Banyu Urip (2003) Kabupaten Bojonegoro mempunyai sekitar 40 sumur yang diperkirakan mengandung 600 juta barel minyak dan 1,7 juta tryliun - 2 tryliun kaki kubik (TCF), sumur tersebut akan dikelola Exxon-mobil. Serta berdasarkan dokumen ANDAL Banyu Urip (2003) lokasi CPF (*Central Processing Facility*) rencananya membutuhkan lahan sebesar \pm 700 ha yang berlokasi di 8 desa : Bonorejo, Gayam, Brabohan, Ringin Tunggal, Mojodelik, Begadon dan Katur. Desa-desa di wilayah tersebut pastikan mengalami perubahan pemanfaatan lahan dari daerah pemukiman dan pertanian menjadi penghasil minyak. Perubahan tata guna lahan ini akan merubah struktur mata pencaharian masyarakat. Semula masyarakat bertumpu pada sektor pertanian, akan beralih ke sektor pertambangan. Akan tetapi masyarakat lokal belum tentu dapat mengakses ke dalamnya. Harapannya dengan berdirinya suatu usaha akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi dengan alasan pendidikan dan keahlian yang tidak memadai, masyarakat tidak bisa bekerja di dalamnya.

Penelitian mengenai dampak sosial-ekonomi eksploitasi pertambangan Banyu Urip penting untuk dilakukan agar masyarakat dan pemerintah dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan dengan baik peluang ekonomi yang muncul dari pelaksanaan proyek ini.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Wahab (2008, h.42), mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan dan keputusan tepatnya “kebijakan ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada keputusan. Kebijakan pada umumnya terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait”. Selanjutnya William R. Dill

dalam Islamy (2003, h.22), mengatakan bahwa keputusan adalah “*a choice among alternative*” (suatu pilihan terhadap berbagai macam pilihan alternatif)

Wahab (2005, h. 63), juga mengatakan bahwa kebijakan yang mengalami kegagalan disebabkan oleh “kebijakan yang jelek (*bad policy*), faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), atau kebijakan bernasib jelek (*bad lucky*)”.

Redelf dan Stance dalam Kurniawan (2011, h. 24), mengatakan bahwa stakeholder adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik atau buruk dan terpengaruh oleh kebijakan publik.

2. Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Dimensi Kebijakan

Quade dalam Hidayat (2012, h.52) mengemukakan bahwa analisis kebijakan merupakan upaya penelitian evaluative (*evaluative research*) yang cermat sebelum pilihan-pilihan kebijakan (*policy choice*) dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan (*course of action*) ditetapkan.

Islamy dalam Hidayat (2012, h.52) menyatakan bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan.

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk memperkirakan perubahan dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan pendekatan aggregate, Menurut Hidayat (2012, h. 55) Pendekatan yang melihat keseluruhan nilai ekonomi atau produksi ekonomi. Pendekatan ini antara lain menggunakan *Baseline* merupakan Prediksi ke depan dilakukan dengan pendekatan regresi (baik linear maupun tidak linear). Dalam pendekatan ini ditempuh asumsi bahwa perilaku ekonomi dimasa yang akan datang ditentukan oleh perilaku dimasa yang lalu.

Selanjutnya dalam analisis dampak sosial dapat digunakan pendekatan *Human Capital* dan *Social Capital* Secara khusus, Coleman (1988) dalam Hidayat (2012, h. 58) tertarik pada hal dimana ketersediaan modal sosial mempengaruhi akumulasi modal manusia.

Menurut Coleman (1988) dalam Hidayat (2012, h. 60) modal sosial itu ada dalam struktur kerjasama antara individu-individu dan sebagian besar tidak tersentuh (*intangible*). Potensi tersebut disadari memiliki kapasitas (fisik dan modal manusia) untuk memudahkan individu-individu beraktivitas dengan produktif.

Menurut Putnam (1993) dalam Hidayat (2012, h. 61) modal sosial terdiri dari tiga komponen diantaranya kewajiban moral dan norma-norma, nilai-nilai sosial (terutama kepercayaan/*trust*), dan jaringan sosial. Tiga komponen tersebut memiliki peran penting dalam mengenalkan *civil communities* dan *civil society* secara umum, menurut Putnam, aktivitas produktif dari modal sosial memiliki kapasitas untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Ancaman bagi kapasitas produktif berasal dari perubahan gejala sosial yang ditunjukkan oleh beberapa kemunduran koordinasi dan kerjasama, melonggarnya ikatan individu dan kelompok, serta menurunnya kepercayaan sosial (*social trust*) dan hubungan antar masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mengungkap fakta yang terdapat di lapangan dan memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dampak sosial-ekonomi alih fungsi lahan pertambangan terhadap masyarakat sekitar yang meliputi perubahan nilai sosial dan peralihan mata pencaharian, dan peran pemerintah daerah dalam menghadapi eksploitasi Banyu Urip, serta peran pemerintah daerah bersama dengan *Mobile Cepu Limited* terhadap pembebasan lahan pertambangan Banyu Urip.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro.

3. Sumber Dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari masyarakat Desa Gayam dan data sekunder meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan diantaranya yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, pedoman observasi, alat perekam dan alat tulis menulis.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan model *Spradley*. Teknik ini tidak terlepas dari keseluruhan penelitian. Keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen,

Pembahasan

Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Terhadap Masyarakat sekitar

1. Perubahan Nilai Sosial

Setelah adanya proyek pertambangan Banyu Urip di Desa Gayam tidak banyak nilai-nilai sosial yang berubah, seperti nilai-nilai Gotong Royong, Bersih Desa, nilai-nilai sosial tersebut masih tetap terlaksana sampai saat ini. Sebelum itu memang banyak terjadi konflik antara warga dan pihak MCL/Kontraktor terkait keresahan dan ketidakpuasan penduduk setempat terhadap kegiatan pembangunan yang merambah wilayahnya sedikit banyak mulai merebak.

Keresahan dan resistensi sosial yang berkembang telah mulai terorganisasi meskipun dianggap belum mewakili aspirasi masyarakat.

Dari latar belakang tersebut lahirlah Serikat Pemuda Banyu Urip (SPBU), pada 21 Maret 2006 sejumlah 500 orang yang tergabung dalam SPBU melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut adanya kesepakatan antara mereka dengan Exxon Mobil/MCL sebelum pengeboran dilakukan. Hal-hal yang menjadi tuntutan mereka adalah agar Exxon memberikan kepastian soal persentase tenaga kerja yang akan

diambil dari masyarakat di sekitar lokasi lapangan minyak dan agar Exxon menyiapkan antisipasi perubahan lingkungan hidup yang akan terjadi selama dan pasca beroperasinya Blok Cepu.

SPBU juga menginginkan kesepakatan mengenai harga lahan/tanah milik warga yang akan dijual kepada Exxon, serta menuntut adanya pembagian hasil sebesar dua persen dari keuntungan Exxon untuk masyarakat di sekitar lapangan Banyu Urip.

Hubermas dalam Hidayat (2012, h.57), seorang tokoh sosiologi kontemporer meyakini bahwa kemajuan suatu komunitas masyarakat ditentukan oleh seberapa besar *human capital* dan *social capital* yang dimiliki.

Bila dilihat dari pemikiran Coleman dan Putnam secara umum, keduanya sama-sama sepakat menyatakan bahwa modal sosial memiliki pengaruh kontrol sosial positif. Individu dan masyarakat bertanggungjawab mengembangkan karakter seperti kepercayaan, saling berbagi informasi dan norma-norma positif masyarakat dalam berperilaku. Namun tetap saja, ada sejumlah permasalahan yang mungkin timbul dari perspektif umum tersebut. Seperti ketidakcukupan ulasan dari konsep *distrust* yang merupakan patologi tindakan kolektif (*collective action*) sehingga menyisakan tindakan sosial yang mengarah pada konflik.

Munculnya unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pemuda Banyu Urip (SPBU) pada 21 Maret 2006 merupakan buah dari ketidakpercayaan masyarakat dengan pihak kontraktor yang dalam hal ini adalah MCL. Dengan tidak adanya *distrust* menjadikan adanya konflik sosial sesuai dengan pemikiran Coleman dan Putnam *distrust* merupakan patologi tindakan kolektif (*collective action*) sehingga menyisakan tindakan sosial yang mengarah pada konflik. Pada kasus-kasus tertentu, hal semacam ini telah menjadi titik rawan bagi munculnya disintegrasi masyarakat, termasuk munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan industrialisasi.

Peningkatan daya sosial agar terciptanya masyarakat yang efektif dan

produktif tentu tidaklah mudah. Teori *social capital* dan *human capital* telah menegaskan bahwa permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat dan pemerintah telah mendesak semua pihak untuk mau belajar membangun kepercayaan, saling membagi dan menularkan nilai, norma dan informasi satu sama lain. Modal sosial berikut elemen-elemennya memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan di tengah masyarakat.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman untuk berpendapat dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan, sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, munculnya disparitas antar kelompok, tidak adanya kepastian hukum dan keteraturan sosial. Maka tidak salah bila *human capital* adalah kunci utama menuju terciptanya *social capital*.

2. Peralihan Mata Pencaharian Masyarakat Sekitar Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan Pertambangan

Sebelum adanya proyek pertambangan warga Gayam dominan bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani ataupun sebagai pedagang hasil pertanian. Selanjutnya tentang peralihan pekerjaan masyarakat Gayam, mereka yang lahan pertaniannya terkena pembebasan kebanyakan beralih bekerja di sektor pertambangan sebagai satpam, tenaga *non skilled*, ataupun berwirausaha sebagai sektor penunjang pertambangan

Dalam menganalisis dampak ekonomi ini penulis menggunakan pendekatan aggregate dengan menggunakan *baseline* Menurut Hidayat (2012, h. 55), yaitu prediksi ke depan dilakukan dengan menggunakan analisis linear maupun tidak linear. Dalam pendekatan ini ditempuh asumsi bahwa perilaku ekonomi dimasa

yang akan datang ditentukan oleh perilaku dimasa yang lalu.

Masyarakat gayam sebelum adanya proyek pertambangan tersebut di mulai dan lahan-lahan mereka sebelum dibeli, mereka pada umumnya kesehariannya bekerja di sektor pertanian. Sebagai petani, buruh tani, ataupun berdagang hasil pertanian. Pertama kali lahan mereka di beli untuk proyek pertambangan yaitu pada sekitaran tahun 2000 proses pembelinya tidak melalui pihak kontraktor tambang ataupun pertamina, tetapi dibeli oleh tengkulak.

Tentunya dengan iming-iming harga yang sudah termasuk mahal pada masa itu banyak warga yang melepas tanahnya, dan ada dua kategori warga pada waktu itu yaitu; 1. Masyarakat yang lahan luas pasti sebagian uangnya akan di belikan lahan pertanian lagi di tempat lain ataupun di belikan tanah di area strategis untuk digunakan usaha, dan yang tidak ketinggalan sebagian uang lainnya digunakan untuk merenovasi/membangun rumah, pergi haji, dan membeli kendaraan bermotor. 2. Masyarakat yang lahannya sedang, uangnya kebanyakan digunakan untuk membangun/merenovasi rumah dan membeli kendaraan bermotor, mereka kebanyakan tidak membeli lahan pertanian lagi ataupun mengembangkan usaha lain.

Warga yang cenderung mengesampingkan pola konsumtif dan mengedepankan arah masa depan dengan mengembangkan usaha dan membelikan lahan produktif yang akan lebih siap menghadapi eksploitasi migas di daerahnya tersebut, dalam konteks masyarakat desa Gayam adalah warga kategori yang pertama yang cenderung akan siap menghadapi eksploitasi migas Banyu Urip. Hal tersebut terlihat pada bapak Nur Hadi beliau sebelumnya bekerja sebagai petani dan sampingan berjualan dipasar dengan menyewa toko kecil, setelah lahannya dibeli untuk proses proyek migas, beliau mengesampingkan pola konsumsi yaitu dengan membeli sebuah toko besar di depan pasar Kecamatan Gayam untuk mengembangkan usahanya dan juga membelikan nya sebuah lahan pertanian yang berada di luar desa Gayam. Kini dengan seiring menjamurnya warung-

warung kecil didaerah sekitar Proyek Migas, toko bapak Nur Hadi menjadi rujukan pembelian/kulakan warung-warung kecil yang berada di sekitar areal proyek Migas.

Selanjutnya untuk warga yang menghabiskan uang mereka untuk pola konsumtif, mereka tentu mendapatkan kemewahan dengan merenovasi rumah menjadi lebih bagus dan indah dan membeli kendaraan bermotor, tentunya kemewahan tersebut tidak berlangsung lama kalau tidak dibarengi dengan *income* yang menjanjikan ke depannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya demo yang seringkali terjadi di daerah proyek migas karena menginginkan keterlibatan warga lokal dalam proyek tersebut. Demo tersebut tentunya melibatkan warga yang sudah tidak memiliki lahan pertanian karena mereka bingung harus bekerja sebagai apa, karena sudah tidak mempunyai lahan pertanian dan lahan pertanian di desa tersebut juga sudah semakin menyempit, salah satunya jalan adalah dengan memaksa untuk dapat masuk dalam proyek pertambangan migas yang berada di wilayah tersebut.

Peran Pemerintah Daerah Menghadapi Eksploitasi Migas Banyu Urip

1. Peran Pemerintah Daerah Dan MCL Terhadap Pembebasan Lahan Pertambangan Banyu Urip

Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi memainkan peranan penting dalam pembebasan lahan. Keterlibatan dalam proses pembebasan lahan adalah momen kolaboratif antara Pemkab Bojonegoro dan Mobil Cepu Limited (MCL).

Land Team Department MCL melakukan pendekatan langsung kepada warga pemilik lahan dan menegosiasikan harga. Land Team Department menangani pembebasan tanah dengan cara mempekerjakan orang-orang yang disewa untuk “membujuk”, menegosiasikan dan membeli tanah-tanah warga, tanpa melibatkan perangkat pemerintah setempat. Kerja Land Team MCL yang tidak melibatkan kepala desa atau perangkat desa ini bukannya tanpa masalah. Sebagai pejabat pemerintah pada level paling bawah, otoritas perangkat desa merasa dilangkahi oleh Land

Team. Apalagi mereka hanya dilibatkan saat permohonan tanda tangan atau ketika dimintai bantuan bila ada kendala-kendala teknis seperti ketidakjelasan data kepemilikan lahan.

Akibat dari pembebasan yang tidak melibatkan perangkat desa, proses pembebasan berjalan lambat sehingga tidak sesuai target yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan yang tidak berhasil artinya bahwa suatu kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil untuk mewujudkan hasil seperti yang diharapkan.

Wahab (2005, h.63) juga mengatakan bahwa kebijakan yang mengalami kegagalan disebabkan oleh “kebijakan yang jelek (*bad policy*), faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), atau kebijakan bernasib jelek (*bad lucky*)”.

Dalam implementasi kebijakan tersebut kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut kurang berhasil untuk mewujudkan hasil seperti yang diharapkan. Kondisi eksternal tersebut karena tidak dilibatkannya stakeholder desa setempat.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Eksploitasi Migas Banyu Urip

Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam menghadapi Eksploitasi Migas Banyu Urip telah mempersiapkan dan menggulirkan kebijakan yang berbasis lokal, yaitu lebih dikenal dengan perda konten lokal. Perda tersebut nampaknya menjadi Perda yang di unggulkan oleh Pemerintah Daerah Bojonegoro, karena merupakan satu-satunya perda di Indonesia yang mengatur sumber daya alam berbasis konten lokal. Dalam perjalanannya perda ini telah banyak membuat perubahan, baik dalam sisi ekonomi maupun sosial.

Selanjutnya jika ditinjau dari tingkat pertumbuhan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, banyak kelompok-kelompok yang mendukung adanya perda

konten lokal ini, dengan hadirnya perda konten lokal yang mewajibkan kontraktor untuk merekrut sebagian besar tenaga kerjanya dari masyarakat lokal menjadikan perda tersebut sebagai perda yang pro takyat, yang tentunya berdampak pada berimbangnya pertumbuhan ekonomi, adanya proyek pertambangan bertumbuh juga angka pendapatan masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran di daerah sekitar.

Dengan adanya perda konten lokal tersebut juga telah meredam aksi-aksi konflik dan unjuk rasa yang dulu banyak terjadi di daerah sekitar khususnya di areal desa Gayam yang merupakan desa terdekat pertambangan, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak Nur Hadi bahwa perda konten lokal telah meredam aksi-aksi unjuk rasa dan konflik antar masyarakat dan pihak kontraktor terutama MCL, karena masyarakat telah diberi kesempatan untuk ikut bekerja di sektor tambang walaupun tidak menjadi tenaga ahli.

Kesimpulan

1. Adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat Gayam jika dibandingkan sebelum adanya proyek Pertambangan Banyu Urip, perubahan pendapatan tersebut mengarah ke arah yang lebih baik dan sejahtera
2. Adanya peralihan mata pencaharian masyarakat Gayam yang sebelumnya dominan sebagai di sektor pertanian beralih ke sektor pertambangan ataupun sektor penunjang/pelengkap pertambangan
3. Dalam melakukan pembebasan lahan pemerintah desa setempat sebagai *stakeholder* terkait harus dilibatkan dalam proses pembebasan lahan.
4. Perda konten lokal yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendapat respon baik dari warga lokal, terutama untuk warg Gayam Perda tersebut telah dapat membuat perubahan terhadap masyarakat Gayam karena telah bisa meredam konflik yang ada di masyarakat Gayam.

Daftar Pustaka

- Hidayat, Sutanto. 2012. **Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik (Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu-Jawa Timur)**. Malang: Disertasi Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Islamy, Irfan. 2003. **Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik**. Malang: Universitas Brawijaya
- Kurniawan, Kafi. 2011. **Alternatif Kebijakan Penataan Pemukiman Kumuh di Kota Malang: Perspektif Stakeholder**. Malang : Skripsi Program Sarjana Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Sugiharto, Eko. 2003. **Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak Banyu Urip – Daerah Kontrak TAC Cepu di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Propinsi Jawa Timur**. Bojonegoro: Badan Lingkungan Hidup.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Malang : UMM Press.

Peraturan dan Perundangan

- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro.